

SKRIPSI

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL TERHADAP
EKSEKUSI UANG PAKSA (*DWANGSOM*) PADA PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**



Oleh:

ALIZ ZULIS AL HURNI

2000024215

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

TAHUN 2024

THESIS

**THE URGENCY OF THE ESTABLISHMENT OF AN EXECUTORIAL
INSTITUTION FOR THE EXECUTION OF FORCED MONEY
(DWANGSOM) IN THE DECISION OF THE BANDUNG
STATE ADMINISTRATIVE COURT**



Written by:

ALIZ ZULIS AL HURNI

2000024215


**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

YEAR 2024

<p>Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center</p>  <p>ii</p>	<p>On: 08/06/2024</p>
---	----------------------------------

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL TERHADAP
EKSEKUSI UANG PAKSA (*DWANGSOM*) PADA PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

**Skripsi ini untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan**



Pembimbing

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Indah Nur Shanty Saleh". The signature is fluid and cursive.

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.

NIPM. 19780530 201908 011 1335083

SUPERVISOR APPROVAL PAGE

**THE URGENCY OF THE ESTABLISHMENT OF AN EXECUTORIAL
INSTITUTION FOR THE EXECUTION OF FORCED MONEY
(DWANGSOM) IN THE DECISION OF THE BANDUNG
STATE ADMINISTRATIVE COURT**

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements to Attain
the Bachelor of Law at Faculty of Law Universitas Ahmad Dahlan**



Supervisor

A handwritten signature in black ink, reading "Indah Nur Shanty Saleh".

Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.

NIPM. 19780530 201908 011 1335083

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On 08/06/2024
--	-------------------------

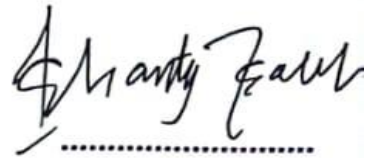
HALAMAN PENGESAHAN

DIPERTAHANKAN DI DEPAN DEWAN PENGUJI SKRIPSI FAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN UNTUK MELENGKAPI
PERSYARATAN DALAM MEMPEROLEH GELAR SARJANA HUKUM

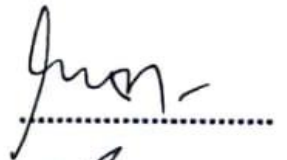
Pada Tanggal: 3 Juni 2024

DEWAN PENGUJI


Ketua Penguji : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.



Anggota Penguji I : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.



Anggota Penguji II : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.



Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NPM: 19580607 202309 010 0584069

APPROVAL PAGE

**EXAMINED BEFORE THE EXAMINER BOARD OF FACULTY OF LAW
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN AS A FULLFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS TO ATTAIN BACHELOR OF LAW**

At the Date: 3 Juni 2024

THE EXAMINER BOARD

Chairman : Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum.

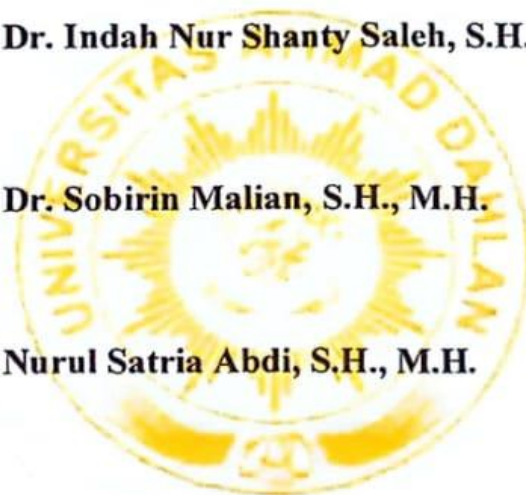
Indah Nur Shanty Saleh
.....

Examiner I : Dr. Sobirin Malian, S.H., M.H.

Sobirin Malian
.....

Examiner II : Nurul Satria Abdi, S.H., M.H.

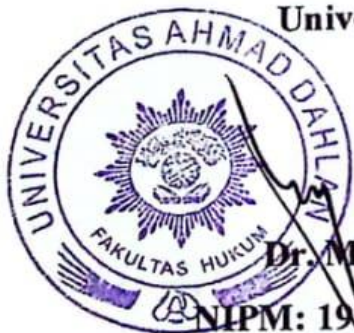
Nurul Satria Abdi
.....



Approved by,

Dekan of Faculty of Law

Universitas Ahmad Dahlan



Dr. Megawati, S.H., M.Hum.

NIPM: 19580607 202309 010 0584069

Has been translated by
Ahmad Dahlan Language Center



On:

08/06/2024

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Aliz Zulis Al Hurni
NIM : 2000024215
Email : Aliz2000024215@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
: Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Terhadap
Judul Skripsi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*) Pada Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan baik di Universitas Ahmad Dahlan maupun di institusi pendidikan lainnya.
2. Hasil karya saya ini bukan saduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian.
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing.
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Ahmad Dahlan.

Yogyakarta, 13, Juni..... 2024




Aliz Zulis Al Hurni

PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Aliz Zulis Al Hurni
NIM : 2000024215
Email : Aliz2000024215@webmail.uad.ac.id
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
: Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Terhadap
Judul Skripsi Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*) Pada Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung

Dengan ini saya menyerahkan hak sepenuhnya kepada Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan untuk menyimpan, mengatur akses serta melakukan pengelolaan terhadap karya saya ini dengan mengacu pada ketentuan akses tugas akhir elektronik sebagai berikut (beri tanda pada kotak):

Saya mengizinkan karya tersebut diunggah ke dalam aplikasi Repository Pusat Sumber Belajar Universitas Ahmad Dahlan

Saya mengizinkan karya tersebut dipublikasikan ke dalam laman jurnal ilmiah yang terdaftar di dalam indeks SINTA

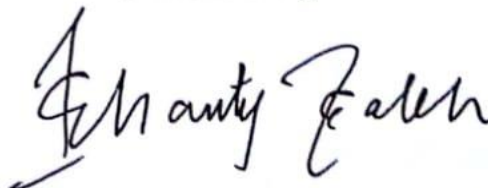
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 13, Juni..... 2024



Aliz Zulis Al Hurni

Mengetahui,
Pembimbing



Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum
NIPM. 19780530 201908 011 1335083

HALAMAN MOTTO

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap"

(Q.S. Al-Insyirah: 6-8)

"Aku tak akan putus asa demi cita-citaku walaupun cobaan datang silih berganti"

(Alfiyah Ibn Malik)

"Kesuksesan tidak datang dengan mudah, tapi melalui kerja keras, tekad yang kuat, dan ketekunan yang tiada henti"

(B.J. Habibie)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil 'Alamin

Dengan segala puja dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Esa serta atas dukungan dan doa dari orang-orang yang teristimewa, akhirnya skripsi ini dapat selesai dengan baik, Oleh karena itu, dengan rasa bangga penulis persembahkan dan haturkan rasa syukur kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT, yang selalu meridhoi dan mengabulkan segala doa karena atas izin dan karunia-Nya maka skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Superhero dan panutanku ayahanda tercinta dan pintu surgaku mamah tercinta yang senantiasa memberikan dukungan dan bantuannya serta menjadi alasan untuk penulis semangat setiap hari sampai bisa menyelesaikan apa yang telah penulis mulai dan menerima gelar kebanggaan dalam keluarga sebagai anak pertama yang berhasil menyandang gelar sebagai seorang Sarjana Hukum.
3. Ibu Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum. yang selama ini telah memberikan ilmu, motivasi, dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang selama ini telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk menuntun, mengarahkan, dan memberikan pelajaran yang tidak ternilai harganya, agar penulis menjadi lebih baik.
5. Komunitas Peradilan Semu Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang mana selama ini menjadi organisasi tempat belajar penulis mengenai dunia peradilan.
6. Seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Terakhir terima kasih untuk diri sendiri karena telah mampu berproses dan berjuang keras sampai sejauh ini tidak menyerah dan terus bertahan sampai akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial Terhadap Eksekusi Uang Paksa (*Dwangsom*) Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung” dengan lancar dan baik.

Selama dalam proses pengerjaan skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat selesai. Sehubungan dengan selesainya skripsi ini, dengan hormat penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan, atas dukungan dan motivasi ilmu dari beliau kepada penulis untuk tekun dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dr. Megawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, atas segala ilmu dan motivasi sehingga skripsi ini dapat selesai.
3. Dr. Indah Nur Shanty Saleh, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan ilmu, motivasi, dan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama pengerjaan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu membimbing penulis selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan dan telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat hingga skripsi ini selesai.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang berguna bagi penulis selama menempuh studi.
6. Seluruh karyawan di Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan, khususnya bagian staf administrasi dan tata usaha yang telah membantu untuk kelancaran administrasi selama penulis menempuh studi.
7. Kedua orang tua penulis yang selalu mendoakan yang terbaik dan memberikan semangat selama ini kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun akan diterima dengan lapang dada demi kesempurnaan tulisan ini. Harapannya semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak. Akhir kata, penulis memohon maaf atas segala salah dan khilaf dalam penulisan skripsi ini karena sesungguhnya kesempurnaan hanya milik Allah SWT.

Yogyakarta, 13 Juni 2024

Penulis



Aliz Zulis Al Hurni

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT.....	vii
PERNYATAAN PERSETUJUAN AKSES.....	viii
HALAMAN MOTTO.....	ix
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR GRAFIK.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian.....	17
D. Manfaat Penelitian.....	17
E. Metode Penelitian.....	18
1. Jenis Penelitian.....	18
2. Sumber Data.....	18
3. Metode Pengumpulan Data.....	21
4. Analisis Data.....	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Penelitian Terdahulu.....	25
B. Kerangka Konseptual.....	37
1. Batasan Istilah.....	37
2. Kerangka Teori.....	41

BAB III URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL TERHADAP EKSEKUSI UANG PAKSA (<i>DWANGSOM</i>) PADA PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG.....	56
A. Gambaran Umum Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	56
1. Sejarah Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	56
2. Visi dan Misi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	61
3. Pelaksanaan Eksekusi Putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	61
B. Urgensi Pembentukan Lembaga Eksekutorial terhadap Eksekusi Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	82
1. Belum adanya lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi dan memaksakan eksekusi uang paksa (<i>dwangsom</i>) pada putusan PTUN.....	83
2. Tidak adanya peraturan pelaksana mengenai uang paksa (<i>dwangsom</i>) pada PTUN Bandung.....	90
3. Kesadaran pejabat TUN yang masih rendah dalam melaksanakan putusan uang paksa (<i>dwangsom</i>) pada PTUN Bandung.....	98
4. Terhambatnya implementasi uang paksa (<i>dwangsom</i>) akibat adanya intervensi kepentingan pejabat TUN dalam suatu KTUN..	110
C. Hambatan Pembentukan Lembaga Eksekutorial terhadap Eksekusi Uang Paksa (<i>Dwangsom</i>) pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.....	115
1. Tidak adanya norma hukum yang jelas mengenai pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (<i>dwangsom</i>) pada putusan PTUN.....	119
2. Ketidakefektifan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.....	123

3. Adanya politik kekuasaan (<i>political juris</i>)	131
	136
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	136
B. Saran	137
<i>Lampiran 1 Hasil Cek Plagiasi</i>	145
<i>Lampiran 2 Transkrip Wawancara</i>	146
<i>Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian</i>	163
<i>Lampiran 4 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian</i>	164

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis.....	29
Tabel 3.1	Data Permohonan Eksekusi Putusan PTUN Bandung dalam Kurun Waktu 5 (lima) Tahun Terakhir.....	72

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Siklus Sengketa Tata Usaha Negara.....	85
Gambar 3.2	Subsistem Pelaksanaan Putusan PTUN.....	87

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1	Hasil Monitoring Dirbinganis Terkait Keberhasilan Pelaksanaan Putusan PTUN Berkekuatan Hukum Tetap Tahun 2020-2021.....	8
Grafik 3.1	Akumulasi Perkara PTUN Bandung Tahun 2019-2023.....	72

**URGENSI PEMBENTUKAN LEMBAGA EKSEKUTORIAL TERHADAP
EKSEKUSI UANG PAKSA (*DWANGSOM*) PADA PUTUSAN
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDUNG**

Aliz Zulis Al Hurni

ABSTRAK

Ketiadaan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menjadikan suatu permasalahan dalam eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari tahun ke tahun. Ketidadaan lembaga eksekutorial tersebut menjadikan problematika yang harus dihadapi oleh PTUN Bandung dengan banyaknya amar putusan yang tidak mengabulkan petitum gugatan penggugat mengenai pengenaan uang paksa (*dwangsom*). Selain itu, amar putusan yang mengabulkan mengenai pembayaran uang paksa (*dwangsom*) juga tidak dapat dieksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui urgensi pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan PTUN Bandung dan untuk mengetahui hambatan pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan PTUN Bandung.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan penggunaan sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier serta sumber data primer berupa wawancara. Adapun metode pengumpulan data yakni studi kepustakaan dan studi lapangan berupa wawancara. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif, sehingga diharapkan pembahasan dapat akurat menjawab rumusan masalah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah belum adanya lembaga yang berkewajiban untuk mengawasi dan memaksakan eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan PTUN, tidak adanya peraturan pelaksana mengenai uang paksa (*dwangsom*), kesadaran pejabat TUN yang masih rendah dalam melaksanakan putusan uang paksa (*dwangsom*) pada PTUN Bandung, dan terhambatnya implementasi uang paksa (*dwangsom*) akibat adanya intervensi kepentingan pejabat TUN dalam suatu KTUN. Hambatan pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung adalah tidak adanya norma hukum yang jelas mengenai pembentukan lembaga eksekutorial terhadap eksekusi uang paksa (*dwangsom*) pada putusan PTUN, tidak efektifnya Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan dan adanya politik kekuasaan (*political juris*).

Kata Kunci: *Lembaga eksekutorial; Uang paksa (dwangsom); PTUN Bandung*

**THE URGENCY OF THE ESTABLISHMENT OF AN EXECUTORIAL
INSTITUTION FOR THE EXECUTION OF FORCED MONEY
(DWANGSOM) IN THE DECISION OF THE BANDUNG
STATE ADMINISTRATIVE COURT**

Aliz Zulis Al Hurni


ABSTRACT

The absence of an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in decisions of the State Administrative Court (PTUN) creates a problem in executing decisions that have permanent legal force from year to year. The absence of an executorial institution creates a problem that the PTUN Bandung has to face, with many decisions not granting the petitem of the plaintiff's lawsuit regarding the imposition of forced money (dwangsom). Apart from that, the decision granting the payment of forced money (dwangsom) also cannot be executed. This research aims to determine the urgency of establishing an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in the PTUN Bandung decision and to find out the obstacles to the formation of an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in the PTUN Bandung decision.

This research uses a normative juridical research type with the use of secondary data sources which include primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials as well as primary data sources in the form of interviews. The data collection methods are literature studies and field studies in the form of interviews. Data analysis was carried out descriptively qualitatively, so it is hoped that the discussion can accurately answer the problem formulation.

The results of the research show that the urgency of establishing an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in decisions of the Bandung State Administrative Court is the absence of an institution that is obliged to supervise and enforce the execution of forced money (dwangsom) in PTUN decisions, the absence of implementing regulations regarding forced money (dwangsom), the awareness of TUN officials is still low in implementing decisions on forced money (dwangsom) at PTUN Bandung, and the implementation of forced money (dwangsom) is hampered due to the intervention of the interests of TUN officials in a KTUN. The obstacles to the formation of an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in the decision of the Bandung State Administrative Court are the absence of clear legal norms regarding the formation of an executorial institution for the execution of forced money (dwangsom) in the PTUN decision, the ineffectiveness of Government Regulation Number 48 of 2016 concerning Procedures how to Impose Administrative Sanctions on Government Officials and the existence of power politics (political juris).

Keywords: Executorial institution; Forced money (dwangsom); PTUN Bandung

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	08/06/2024